

**PENGARUH KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA, PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGENDALIAN AKUNTANSI
TERHADAP NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Padang)**

DRAFT SKRIPSI



Oleh :

HANDRIKO HARIFAN

2004/48839

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2009

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA,
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN
PENGENDALIAN INTERN AKUNTANSI TERHADAP NILAI
INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Padang)**

Nama : Handriko Harifan
Bp/ NIM : 2004/ 48839
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Padang, Juni 2009

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Syamwil, M.Pd
NIP. 195 908 201 987 031 001

Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak
NIP. 197 105 222 000 032 001

ABSTRAK

Handriko Harifan.(2004/48839). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan pada Instansi Pemerintah di Kota Padang. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. 2009.

Pembimbing I : Drs. Syamwil, M.pd
II : Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang: Pengaruh (1) Kapasitas sumber daya manusia, (2) Pemanfaatan Teknologi Informasi, (3) Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan pada Instansi Pemerintah Daerah di Kota Padang. Untuk itu dilakukan penelitian pada pegawai instansi pemerintah daerah di Kota Padang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif. Populasi dari penelitian ini adalah kepala dan staf subbagian akuntansi/ keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari: Sekretariat, Dinas, Badan, Kantor, dan Kecamatan. Teknik pengambilan sampel digunakan adalah *total sampling*. Jumlah sampel adalah sebanyak 86 orang. Data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan metode penyebaran kuisioner. Data diolah dengan menggunakan analisis regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi secara bersama- sama berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah, dengan nilai signifikansi sebesar 0.000, 2). kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah, dengan nilai signifikansi sebesar 0.045, 3). pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah, dengan nilai signifikansi sebesar 0.010, 4).Pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah, dengan nilai signifikansi sebesar 0,003

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, pujian yang jauh lebih baik dari apa dapat penulis ucapkan atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **“Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalain Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah”** dapat diselesaikan. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari, skripsi ini bukanlah semata-mata atas kemampuan sendiri, tapi atas bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Terima kasih kepada Pembimbing I Bapak Drs. Syamwil M.Pd dan Pembimbing II Ibu Eka Fauzihardani SE, M.Si, Akt atas bimbingan dan dorongannya. Pada kesempatan ini penulis dengan penuh ketulusan menyampaikan dan mengucapkan penghargaan serta terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Ketua dan Bapak Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang beserta seluruh staf administrasi.
4. Orang tuaku H. Hasan Basri dan Usi yang selalu mendo'akan, memberi dukungan moral dan materil agar anak keduanya ini selalu bersemangat dan sukses dalam menjalani kehidupannya, khususnya dalam penyelesaian skripsi

ini. Untuk kakakku Zulkarnaini SE, M.Si, Yemi Hanis Amd, Yetmaneli SP, MP, Kartini ST, Hendri Kumar Amd, Fatmawati dan adikku Senia Faradina', do'a, perhatian dan kasih sayang kalian pada saat melakukan penelitian dan penyelesaiannya merupakan sesuatu yang sangat berarti.

5. Kepada teman-temanku dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak.

Akhirnya atas bantuan, petunjuk, arahan, bimbingan, motivasi dan kerjasamanya, semoga Allah SWT memberikan imbalan berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dunia penelitian dan akademis. Amin ya Rabbal Alamin.

Padang, Mei 2009,

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	13
C. Batasan Masalah	13
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan Penelitian	14
F. Manfaat Penelitian	15
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN	
HIPOTESIS.....	16
A. Kajian Teori	16
B. Kajian Riset	52
C. Hubungan antar variabel.....	55
D. Kerangka Konseptual.....	61
E. Hipotesis.....	63

BAB III METODE PENELITIAN	64
A. Jenis Penelitian	64
B. Tempat dan Waktu Penelitian	64
C. Populasi Dan Sampel	65
D. Jenis Dan Sumber Data	67
E. Metode Pengumpulan Data	68
F. Variabel dan Pengukuran Variabel.....	68
G. Instrumen Penelitian	70
H. Uji Instrumen	72
I. Uji Asumsi Klasik	75
J. Model dan Teknik Analisis Data	77
K. Definisi Operasional	82
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	83
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	83
B. Hasil Penelitian.....	84
C. Demografi Responden.....	85
D. Uji Instrument.....	90
E. Analisis Deskriptif.....	95
F. Uji Asumsi Klasik.....	100
G. Pengujian Model Penelitian.....	103
H. Pengujian Hipotesis.....	105
I. Pembahasan.....	109

BAB V PENUTUP.....	114
A. Simpulan.....	114
B. Keterbatasan.....	115
C. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA.....	117

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Nama Instansi Pemerintah Daerah Kota Padang.....	66
2. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian.....	70
3. Tingkat Pengembalian Kuisisioner.....	84
4. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	85
5. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	86
6. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	87
7. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan.....	88
8. Karakteristik Responden Berdasarkan Pelatihan Akuntansi.....	89
9. Uji Validitas Nilai Informasi Pelaporan Keuangan.....	91
10. Uji Reliabilitas Nilai Informasi Pelaporan Keuangan.....	91
11. Uji Validitas Kapasitas Sumber Daya Manusia.....	92
12. Uji Reliabilitas Kapasitas Sumber Daya Manusia.....	92
13. Uji Validitas Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	93
14. Uji Reliabilitas Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	93
15. Uji Validitas Pengendalian Intern Akuntansi.....	94
16. Uji Reliabilitas Pengendalian Intern Akuntansi.....	94
17. Distribusi Frekuensi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan.....	95
18. Distribusi Frekuensi Kapasitas Sumber Daya Manusia.....	97
19. Distribusi Frekuensi Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	98

20. Distribusi Frekuensi Pengendalian Intern Akuntansi.....	99
21. Uji Normalitas.....	101
22. Uji Multikolinearitas.....	102
23. Uji Heterokedastisitas.....	103
24. Koefisien Regresi	103
25. Adjusted R Square.....	105
26. Uji F Hitung.....	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bentuk Informasi.....	34
2. Kerangka Konseptual	62
3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	86
4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	87
5. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	88
6. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Jabatan	89
7. Karakteristik Responden Berdasarkan Pelatihan Akuntansi.....	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuisisioner Penelitian.....	120
2. Surat Izin Penelitian.....	125
3. Data Mentah Kuisisioner.....	129
4. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas <i>Pilot Test</i>	135
5. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian.....	139
6. Hasil Uji Normalitas.....	143
7. Hasil Uji Multikolinearitas.....	144
8. Hasil Uji Heterokedastisitas.....	145
9. Hasil Uji Regresi Berganda.....	146
10. Hasil Uji Frekuensi.....	147

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Menurut Mardiasmo (2002:20) akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik

Dimensi akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial (keuangan). Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas finansial, khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya (*stakeholder*). *Governmental Accounting Standards Board* (1999) dalam *Concepts Statement No. 1 tentang Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya.

Harus disadari bahwa ada banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Mardiasmo (2002:168) mengidentifikasi sepuluh pemakai laporan keuangan pemerintah, yaitu: (1) pembayar pajak (*tax payer*), (2) pemberi dana bantuan (*grantors*), (3) investor, (4) pengguna jasa (*fee-paying service recipients*), (5) karyawan/ pegawai, (6) pemasok (*vendors*), (7) dewan legislatif, (8) manajemen, (9) pemilih (*voters*), (10) badan pengawas (*oversigh bodies*).Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai.

Menurut Suwardjono (2005:165) informasi harus bermanfaat bagi para pemakai, sama saja dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut berpaut dengan keputusan yang menjadi sasaran informasi. Informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut dipahami dan digunakan oleh pemakai. Informasi juga akan bermanfaat kalau pemakai mempercayai informasi tersebut.

Kebermanfaatan (*usefulness*) merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan, pemakai, dan keyakinan pemakai terhadap informasi. Oleh karena itu, kriteria ini secara umum disebut karakteristik kualitatif (*qualitative characteristics*) atau kualitas (*qualities*) informasi. Adapun kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat sebagaimana disebutkan dalam

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan terdiri dari (PP No. 24 Tahun 2005): (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan, dan (d) dapat dipahami.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dari tulisan yang berhasil didapatkan dari media masa ternyata di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai, menurut Nasution (.2008: 1)

“...laporan keuangan Pemerintah Daerah banyak yang bermasalah bahkan tidak layak audit. Permasalahan yang ditemukan diantaranya terkait sangat rendahnya akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Pemda, ketidakjelasan penyimpanan dana daerah dan penggunaan keuangan daerah yang tidak jelas keperluannya”

Berdasarkan fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah masih belum seluruhnya memenuhi kriteria keterpahaman atau dapat dipahami. Mengingat bahwa keterpahaman merupakan unsur nilai informasi yang penting terkait dengan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Daerah. Di dalam Konsep Standar Pemeriksaan Keuangan Negara pada bab Standar Pekerjaan Lapangan Pemeriksaan Keuangan mengenai Pengendalian Intern disebutkan bahwa sistem informasi yang relevan dengan tujuan laporan keuangan, salah satunya adalah sistem akuntansi yang terdiri dari metoda dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, mengikhtisarkan, dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang, dan ekuitas yang bersangkutan (BPK RI, 2006).

Sistem akuntansi sebagai suatu sistem informasi yang menghasilkan laporan keuangan membutuhkan manusia untuk menjalankan sistem yang ada. Dalam acara sosialisasi program anti korupsi yang digelar BPKP Sumatera barat

untuk fokus group Bawasda, kepala bidang investasi Mohamad Badwir menjelaskan bahwa pada saat ini pemerintah dalam membuat laporan keuangan dari sisi sumber daya manusia masih banyak bermasalah baik itu dari segi administrasi, tidak memahami peraturan yang ada sampai kepada segi pertanggungjawaban sehingga berpengaruh terhadap kualitas laporan yang dihasilkan (PadangEkspres, 2008:2). Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Indriasari (2008) yang dilakukan pada pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir menyebutkan bahwa kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Ogan Ilir dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia yang dimilikinya.

Menurut Wahyono (2004:12) informasi harus dapat dipahami sebagai salah satu indikator berkualitasnya suatu informasi. Mudah dipahami disini menyangkut sumber daya manusia yang menghasilkannya. Sumber daya manusia pengguna sistem dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai atau paling tidak memiliki kemauan untuk terus belajar dan mengasah kemampuannya di bidang akuntansi. Hal ini sejalan dengan komitmen dilingkungan pemprov Sumbar dan Pemkab/ Kota se-Sumbar dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, bernilai informasi, transparan dan akuntabel, seperti yang diungkapkan Gubernur Sumatera Barat pada saat pencerahan rencana aksi Pemprov Sumbar menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemprov Sumbar tahun 2008 di gurbanuran. Menurut Fauzi (PadangEkspres.2008: 16):

“...guna mempercepat proses terkait dengan penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan berdasarkan PP 24 tahun 2005, semua SKPD untuk menyelenggarakan akuntansi *double entry* berbasis komputer dalam waktu dekat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dengan menempatkan tenaga setingkat ajun akuntan (D3) selain itu juga akan melatih tenaga ajun akuntan konsentrasi akuntansi keuangan daerah dalam waktu 10 bulan yang tersebar pada masing-masing SKPD”

Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006 (dalam Indriasari, *et al.* 2008), saat ini secara bertahap pemerintah berpindah meninggalkan sistem akuntansi *single entry* menjadi *double entry* karena penggunaan *single entry* tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif dan mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Basis akuntansi yang diterapkan pun mengalami perubahan dari basis kas (*cash basis*) ke basis akrual (*accrual basis*). Permasalahan penerapan basis akuntansi bukan sekedar masalah teknis akuntansi, yaitu bagaimana mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan, namun yang lebih penting adalah bagaimana menentukan kebijakan akuntansi (*accounting policy*), perlakuan akuntansi untuk suatu transaksi (*accounting treatment*), pilihan akuntansi (*accounting choice*), dan mendesain atau menganalisis sistem akuntansi yang ada. Kebijakan untuk melakukan aktivitas tersebut tidak dapat dilakukan oleh orang (pegawai) yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang akuntansi. Oleh karena itu diperlukan sumber daya manusia yang kompeten sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan bernilai informasi.

Hal kedua yang mungkin mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Seperti kita ketahui bahwa total volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah

(APBN/D) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kualitas yang semakin rumit dan kompleks.

Menurut Sugijanto (56:2002), peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks tentu harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah. Untuk itu Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah. Berkaitan dengan pemanfaatan kemajuan teknologi di lingkungan pemerintah daerah, Pelaksanan tugas (Plt) Sekretaris Daerah Sumbar, Asrul Syukur di Padang (Singgalang,2009:13) menjelaskan bahwa setiap pejabat harus bisa menggunakan teknologi, para pejabat dalam menjalankan tugasnya diharapkan menguasai teknologi informasi sehingga berbagai tugas dapat dijalankan dengan baik seperti komputer.

Menurut Widjajanto (89:2001), suatu teknologi informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, manajemen data, dan jaringan. Walaupun secara umum telah banyak diketahui manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan,

keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, kos pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan *multiprocessing*, namun pengimplementasian teknologi informasi tidaklah murah. Terlebih jika teknologi informasi yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal. Kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi ini mungkin juga memiliki pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah.

Hal ketiga yang mungkin mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah adalah pengendalian intern akuntansi. Sesuai yang ditegaskan Gubernur Sumatera Barat berkaitan dengan pelaporan keuangan pemerintah dan penggunaan informasi dalam menghasilkan opini auditor. Menurut Fauzi (2008:15):

“... ada empat hal yang dapat mempengaruhi opini auditor atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), penerapan pengendalian intern yang memadai, ketaatan terhadap peraturan dan pengungkapan yang lengkap”

Menurut Riasetiawan (dalam Indriasari, *et al.*2008) Sistem akuntansi sebagai sistem informasi merupakan subjek terjadinya kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Menurut Wahyono (2004:5) Sistem informasi sudah menjadi satu kesatuan dari proses akuntansi, mulai dari akuntansi

keuangan, audit dan saat ini sampai pada sistem pengendalian sehingga akuntansi diharapkan mampu memproses serta menghasilkan data keuangan dan non keuangan menjadi suatu informasi yang dapat digunakan (bernilai) untuk pengambilan keputusan. Oleh karena sistem akuntansi memerlukan pengendalian intern atau dengan kata lain nilai informasi akuntansi berkaitan erat dengan pengendalian intern organisasi.

Pengendalian intern menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Ada tiga fungsi yang terlihat dari definisi tersebut yaitu: (a) keterandalan pelaporan keuangan, (b) efisiensi dan efektivitas operasi, dan (c) kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi pertama dilakukan untuk mencegah terjadinya inefisiensi dan dinamakan pengendalian intern akuntansi, sedangkan fungsi kedua dan ketiga dilakukan secara khusus untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dan dinamakan pengendalian intern administratif, dalam Triyuwono & Roekhudin (151:2000)

Deri penelitian yang dilakukan Dinata (2004) yang meneliti mengenai sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintah Kota Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar sumber daya manusia yang ada di Kota Palembang belum sepenuhnya siap atas berlakunya Sistem Akuntansi

Keuangan Daerah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintah masih belum memadai. Kapasitas sumber daya manusia yang masih minim ini memiliki pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah. Sedangkan dari penelitian Indriasari, *et al* (2008) yang meneliti mengenai nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Ogan Ilir menghasilkan kesimpulan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai informasi (keandalan dan ketepatanwaktuan) pelaporan keuangan pemerintah

Dari penelitian Muliani (2000) menghasilkan kesimpulan bahwa perkembangan teknologi informasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap bidang akuntansi manajemen. Kehadiran teknologi informasi memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, seperti mampu meringankan aktivitas bisnis yang kompleks serta menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, relevan, tepat waktu, lengkap, dapat dipahami, dan teruji dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan manajemen. Oleh sebab itu peneliti juga menguji apakah penerapan teknologi informasi juga mempunyai dampak positif terhadap penciptaan nilai informasi pada manajemen pemerintahan, terutama dalam hal pelaporan keuangan pemerintah.

Peneliti termotivasi oleh penelitian Indriasari, *et al* (2008) yang meneliti pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi (yaitu keterandalan dan ketepatanwaktuan) pelaporan keuangan pemerintah pada Kota Palembang.

Berdasarkan penelitian terdahulu bahwa ada kontribusi lainnya yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya, misalnya dua nilai informasi lain yang belum diteliti yaitu dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Fokus pada penelitian ini adalah menguji pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi (dapat dipahami/ keterpahaman) pelaporan keuangan pemerintah daerah di Kota Kota Padang. Hal ini juga didukung dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh pemerintah kota (Pemko) Padang saat ini dalam hal pelaporan keuangan. Seperti yang diungkapkan oleh anggota Komisi B DPRD Kota Padang Rahayu Purwanti kepada harian Padang ekpres. Menurut Purwanti (2009:10)

“...menilai selama ini etos kerja pegawai di lingkungan Pemko Padang masih lemah. Hal ini didasari hasil laporan keuangan masing- masing SKPD yang terkesan “ asal jadi”. Ini didukung pendapat yang diberikan BPK terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemko tahun 2007 dengan tidak memberikan pendapat (*disclaimer*)”.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel dependent yaitu nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Padang yang difokuskan pada tingkat keterpahaman. Alasan peneliti menggunakan tingkat keterpahaman sebagai nilai informasi adalah karena laporan keuangan yang dibuat akan digunakan sebagai alat pengambil keputusan sehingga diharapkan informasi yang diperoleh oleh pemakai dihasilkan dari sistem yang sesuai dengan klasifikasi yang ada atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan Menurut Wahyono (12:2004) Informasi

harus dapat dipahami (*understandability*). Mudah dipahami di sini menyangkut dua elemen pokok, yaitu informasi yang dihasilkan dan sumber daya manusia yang menggunakannya. Menyangkut informasi yang dihasilkan, maka informasi tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terlalu rumit, tidak menggunakan istilah yang kabur serta menggunakan klasifikasi yang lazim oleh pembuat laporan.

Keterpahaman yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pelaporan keuangan yang meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Aspek-aspek tersebut antara lain lembaga yang terlibat, peraturan yang berlaku termasuk PABU, dan mekanisme penyampaian informasi. Informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah. Sampai sekarang ini, berdasarkan hasil penilain BPK masih ditemukan empat Kabupaten/ Kota di Sumbar yang memperoleh opini disclaimer dalam pengelolaan keuangan daerah, bahkan meningkat dari tiga Pemda tahun 2006 menjadi lima Pemda tahun 2007. Pemda dan Pemrov wajib untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan daerah secara transparan dan akuntabel mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi sampai dengan pelaporan keuangan yang bertanggungjawab dalam penggunaan anggaran. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan pemahaman mengenai Standar Akuntansi Pemerintah yang mulai diterapkan Tahun 2005. (*ANTARA News*, 2008).

Memperhatikan kinerja dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki baik pada tingkatan sistem, kelembagaan, maupun

individu, didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin, dan adanya rancangan pengendalian intern akuntansi yang memadai diharapkan pihak pengelola keuangan daerah khususnya bagian akuntansi mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya bermuara pada dihasilkannya laporan keuangan pemerintah daerah yang dapat dipahami oleh semua pengguna dan stake holder. Hal ini didasarkan pada (PP.No. 24 Tahun 2005), adapun kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat sebagaimana disebutkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan terdiri dari (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan, dan (d) dapat dipahami

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi serta pengaruhnya terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah dengan judul **“Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diketahui terdapat berbagai permasalahan. Untuk itu penulis mengemukakan masalah yaitu:

1. Apakah kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah?
2. Apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah?
4. Apakah pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah?
5. Apakah kriteria kualitas informasi berpengaruh terhadap Pelaporan keuangan pemerintah?
6. Apakah Pelaporan keuangan pemerintah telah memenuhi kriteria kualitas informasi yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan?
7. Apakah laporan keuangan pokok pemerintah telah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami?

C. Pembatasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan permasalahan serta data yang akan dibahas dan dikumpulkan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi pembahasan mengenai pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi

informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada instansi pemerintah daerah di kota Padang.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah dan sejauh mana kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi secara bersama- sama berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah?
2. Apakah dan sejauh mana kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah?
3. Apakah dan sejauh mana pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah?
4. Apakah dan sejauh mana pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris :

1. Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi secara bersama- sama terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada instansi pemerintah di Kota Padang

2. Pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada instansi pemerintah di Kota Padang.
3. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada instansi pemerintah di Kota Padang
4. Pengaruh pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada instansi pemerintah Kota Padang

F. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat kepada:

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai pelaporan keuangan pemerintah.
2. Bagi dunia pendidikan akuntansi, dapat menjadi bahan masukan dan referensi dalam bidang akuntansi pemerintahan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan referensi yang akan mengadakan kajian lebih luas dalam bahasan ini.
4. Hasil ini diharapkan bisa dijadikan dasar atau acuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Dengan memperhatikan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki baik pada tingkatan sistem, kelembagaan, maupun individu, didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin, dan adanya rancangan pengendalian intern akuntansi yang memadai bagi pihak pengelola keuangan daerah khususnya bagian akuntansi

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Pelaporan Keuangan Pemerintah

Menurut Suwardjono (2004:101) pelaporan keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomik dan sosial negara. Sedangkan menurut FASB dalam *Statement of Financial Accounting Concepts* mengartikan pelaporan keuangan sebagai sistem dan sarana penyampaian informasi tentang segala kondisi dan kinerja perusahaan terutama dari segi keuangan dan tidak terbatas pada apa yang dapat disampaikan melalui statement keuangan.

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain, yaitu para pemangku kepentingan (*stakeholder*), tentang kondisi keuangan pemerintah. Di Indonesia, laporan keuangan pokok yang harus dibuat oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam pasal 30 UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara meliputi: a.Laporan Realisasi APBN/D, b.Neraca, c.Laporan Arus Kas, d.Catatan atas Laporan Keuangan,dan e.Lampiran Laporan Keuangan perusahaan negara/ daerah. Tujuan pelaporan keuangan menurut PP No. 24 Tahun 2005 yaitu: a.Akuntabilitas, b.Manajemen, c.Transparasi, dan d.Keseimbangan antar generasi.

Menurut Anggraini (2002:21) apabila aktivitas dana suatu pemerintah untuk suatu periode pelaporan telah dicatat, maka data perlu diikhtisarkan untuk tujuan :

- a. Pelaporan bahwa aktivitas telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku
- b. Pelaporan posisi keuangan kesatuan pemerintah pada akhir periode pelaporan
- c. Pelaporan perubahan (misalnya penghasilan dan pengeluaran) sumber yang dapat digunakan.

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota terdiri dari (Taufik, 2008:21) :

a. Pendahuluan

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode

b. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan

1).Peranan pelaporan keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan

2).Tujuan pelaporan keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik Untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan pemerintah, laporan keuangan

pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, equitas dana dan arus kas pemerintah daerah. dengan:

- (1)Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran
- (2)Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan perundang-undangan
- (3)Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
- (4)Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber- sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- (5)Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- (6)Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah serta hasil- hasil yang telah dicapai

c. Entitas pelaporan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang- undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah

pemerintah daerah atau satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi lainnya dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

d. Dasar hukum pelaporan keuangan

- 1) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
- 2) Undang- undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara;
- 3) Undang- undang No.1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara;
- 4) Undang- undang No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah;
- 5) Undang- undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah;
- 6) Undang- undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah;
- 7) Peraturan pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah;
- 8) Peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah;
- 9) Peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah; dan
- 10) Peraturan kepala daerah tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan

keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah dan menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi bagi para pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh Akuntansi Keuangan Daerah akan digunakan oleh berbagai pihak. Pihak yang terlibat dan berkepentingan terhadap Pemerintah Daerah baik itu langsung maupun tidak langsung yang disebut sebagai pemakai laporan keuangan daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pengawas Keuangan, Rakyat, Pemerintah Pusat, dan Donatur.

2. Nilai Informasi

a. Pengertian Nilai Informasi

Menurut Suwardjono (2005:111) nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan. Suwardjono (2005:165), agar manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah dapat dipenuhi maka informasi yang disajikan harus merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Informasi akan bermanfaat kalau informasi dapat dipahami dan digunakan oleh para pemakai. serta informasi juga bermanfaat kalau pemakai mempercayai informasi tersebut.

Menurut Wahyono (2004:12) dalam menghasilkan suatu nilai informasi yang bernilai (dapat dipahami) disini menyangkut dua elemen pokok, yaitu informasi yang dihasilkan dan sumber daya yang menghasilkannya. Menyangkut informasi yang dihasilkan, maka informasi laporan keuangan tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terlalu rumit bagi pemakai dan bernilai, dengan tidak menggunakan istilah- istilah yang kabur serta menggunakan klasifikasi peraturan yang lazim atau yang berlaku. Kemudian menyangkut kemampuan sumber daya manusia yang akan menjalankan sistem atau yang menghasilkan informasi tersebut, yang dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai dan atau paling tidak memiliki keinginan untuk terus belajar dan mengasah kemampuannya dibidang akuntansi. Disini kemampuan sumber daya manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang bernilai (dapat dipahami).

Pemanfaatan atau pengaplikasian teknologi informasi dalam organisasi juga mempunyai peran terhadap pembentukan nilai informasi pelaporan keuangan Menurut Wahoyono (2004:12) Informasi yang dapat dipahami (*understanbility*) adalah informasi akuntansi yang dapat membantu dan berguna bagi pengambilan keputusan . Agar berguna bagi pengambilan keputusan maka informasi tersebut harus memiliki sifat relevan dan dapat dipercaya. Informasi yang relevan berarti memiliki sifat tepat waktu, memiliki nilai prediksi, dan mampu diterapkan untuk keperluan *review* dan koreksi. Sedangkan menurut Jogiyanto (1995:41) Informasi yang tepat waktu yang

merupakan bagian dari nilai informasi (keterpahaman) dapat dicapai dengan peran komponen teknologi. Komponen teknologi sistem komputer mempercepat proses pengolahan data dengan penggunaan *software* dan komponen teknologi telekomunikasi mempercepat proses transmisi data yang mana akan mendukung penciptaan proses nilai informasi.

Menurut Jogiyanto (1995:18) informasi adalah merupakan produk dari sistem teknologi informasi. Teknologi informasi berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan didalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif. Lebih efektif karena pengambilan keputusan didasarkan dengan nilai informasi yang akurat, tepat waktu, relevan dan dapat dipahami. Hal ini juga sejalan dengan cita-cita pemerintah dalam rangka peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam PP.No 24 Tahun 2005 yang mengatur tentang kriteria kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat dalam pengambilan keputusan oleh semua pengguna dan stake holder. Jogiyanto (1995:8) pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi mutlak diperlukan dalam organisasi terutama dalam menghasilkan nilai informasi yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan.

Wahyono (2004:12) kriteria lain nilai Informasi yang dapat dipahami adalah akurat (*accurate*) dan andal. Untuk mencapai informasi yang akurat diperlukan komponen pengendalian/ kontrol. Komponen kontrol atau pengendalian akan menjaga sistem informasi dari kesalahan-kesalahan yang

disengaja atau tidak disengaja. Dengan adanya komponen kontrol dapat menunjang sistem informasi menghasilkan informasi yang bernilai (keterpahaman). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kriteria nilai informasi dapat dipahami / keterpahaman tidak dapat dipisahkan dari aspek atau lingkungan pengendalian . Sedangkan menurut Arens dalam Amir (1996: 258), manajemen mempunyai kewajiban dan kepentingan untuk melaksanakan pengendalian intern dalam hal menyiapkan laporan keuangan. Manajemen mempunyai kewajiban hukum dan profesional untuk menjamin bahwa informasi telah disiapkan sesuai dengan standar pelaporan, misalnya prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Menurut Suwardjono (2005:167) informasi dikatakan mempunyai nilai apabila informasi tersebut :

- 1). Menambah pengetahuan pembuat keputusan tentang keputusannya di masa lalu, sekarang, atau masa datang
- 2). Menambah keyakinan para pemakai mengenai probabilitas terealisasinya suatu harapan dalam kondisi ketidakpastian
- 3). Mengubah keputusan atau perilaku para pemakai.

b. Unsur- unsur Kualitas Informasi

Mengatakan bahwa informasi harus bermanfaat bagi para pemakai sama saja dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai. Adapun unsur- unsur pembentukan kualitas informasi dalam Suwardjono (2005: 168) adalah sebagai berikut:

1) Keterpahaman (*Understandibility*)

Keterpahaman adalah kemampuan informasi untuk dapat dicerna maknanya oleh pemakai. Dua faktor mempengaruhi keterpahaman informasi yaitu pemakai dan informasi itu sendiri. FASB menganalogikan informasi sebagai alat atau perkakas (tool). Alat akan bermanfaat bagi pemakai kalau alat tersebut memang alat yang cocok atau tepat dan pemakai bersedia untuk belajar mengenai kemampuan dan cara kerja alat tersebut. Betapapun canggihnya, suatu alat menjadi tidak bermanfaat kalau pemakai tidak mengetahui gunanya. Sebaliknya, alat yang jelas diketahui gunanya menjadi tidak terpakai lantaran pemakai tidak tahu dan tidak bersedia belajar cara menggunakannya.

Walaupun FASB mengacu pemakai sebagai profesional dan nonprofesional, pemakai nonprofesional harus bersedia mempelajari informasi dengan ketekunan yang cukup. Dengan demikian, tidak selayaknya pembuat kebijakan akuntansi (penyusun standar) tidak bersedia memperkenalkan sesuatu yang baru (misalnya istilah yang tepat) karena khawatir pemakai tidak tahu atau bingung sementara yang diacu adalah pemakai awam yang tidak mau lagi belajar. Kualitas keterpahaman juga memberi isyarat bahwa pembuat kebijakan harus berupaya agar informasi dapat dipahami misalnya dengan pendidikan melalui media pembelajaran yang sesuai (misalnya seminar, lokakarya, atau pelatihan)

2) Keberpautan (*Relevance*)

Keberpautan adalah kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam membedakan beberapa alternatif keputusan sehingga pemakai dapat dengan mudah menentukan pilihan. Bila dihubungkan dengan tujuan pelaporan keuangan, keberpautan adalah kemampuan informasi untuk membantu investor, kreditor, dan pemakai lain dalam menyusun prediksi-prediksi tentang beberapa munculan (*outcomes*) dari kejadian masa lalu, sekarang dan masa akan datang atau dalam mengkonfirmasi ketidakpastian suatu keputusan yang dibuat sehingga keputusan yang telah dibuat sehingga keputusan tersebut tetap dipertahankan atau diubah.

3) Nilai Prediktif (*Predictive Value*)

Nilai prediktif adalah kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam meningkatkan probabilitas bahwa harapan-harapan pemakai akan muncul/ hasil suatu kejadian masa lalu atau datang akan terjadi. Nilai prediksi disini adalah jenis dan sifat informasi yang menjadi masukan dalam proses prediktif. Dengan kata lain, nilai prediksi adalah kemampuan informasi dalam memperbaiki kemampuan atau kapasitas pembuat keputusan untuk melakukan prediksi

4) Nilai Balikan (*Feedback Value*)

Nilai balikan adalah kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam mengkonfirmasikan dan mengoreksi harapan- harapan pemakai di masa lalu. Jadi, nilai balikan adalah kemampuan informasi untuk dijadikan basis

mengevaluasi apakah keputusan- keputusan masa lalu adalah tepat dengan datangnya informasi tersebut.

5) Ketepatanwaktuan (*Timeliness*)

Ketepatanwaktuan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Tersedianya informasi lama setelah suatu kejadian yang memerlukan tanggapan atau keputusan berlalu menjadikan informasi tersebut tidak punya nilai lagi. Secara sendiri, ketepatanwaktuan tidak membuat informasi menjadi berpaut tetapi kurangnya ketepatanwaktuan dapat menyita keberpautan yang melekat pada informasi.

6) Keterandalan (*Reliability*)

Keterandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar dan valid. Informasi akan menjadi berkurang nilainya karena orang yang menggunakan informasi meragukan kebenaran atau validitas informasi tersebut. Informasi akan mempunyai nilai yang tinggi kalau pemakai mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap kebenaran informasi. Harus di disadari bahwa keterandalan mempunyai tingkatan bergantung pada kondisi yang melingkupinya.

7) Ketepatan Penyimbolan (*Representational Faithfulness*)

Ketepatan penyimbolan adalah kesesuaian atau kecocokan antara pengukur atau deskripsi dan fenomena yang diukur atau dideskripsi. Dalam akuntansi, fenomena yang ingin direpresentasikan adalah kondisi fisis, kondisi keuangan, dan kegiatan ekonomik badan usaha berupa sumber ekonomik,

kewajiban keuangan, dan transaksi atau kejadian yang mengubah sumber ekonomi dan kewajiban tersebut.

8) Keterujian (*Verifiability*)

Keterujian adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan yang tinggi kepada para pemakai karena tersedianya sarana bagi para pemakai untuk menguji secara independent ketepatan penyimbolan. Proses keterujian dalam akuntansi tidak dengan sendirinya selalu menjamin bahwa suatu informasi mempunyai kualitas ketepatan penyimbolan sebenarnya merupakan konsesus atau ketentuan yang dihasilkan dari proses perekayasaan pelaporan keuangan.

9) Kenetralan (*Neutrality*)

Kenetralan adalah ketidakberpihakan pada grup tertentu atau ketidakbiasan dalam perlakuan akuntansi. Ketidakbiasan berarti bahwa informasi yang disajikan tidak untuk mengarahkan grup pemakai tertentu agar bertindak sesuai dengan keinginan penyedia informasi atau untuk menguntungkan atau merugikan grup pemakai tertentu atau untuk menghindari akibat/ konsekuensi tertentu bagi sekelompok pemakai.

10) Keterbandingan (*Comparability*)

Keterbandingan adalah kemampuan informasi untuk membantu para pemakai mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara dua perangkat fenomena ekonomik (misalnya dua perangkat statement keuangan yang mempresentasikan kegiatan dua badan usaha). Keterbandingan merupakan unsur tambahan yang menjadikan informasi bermanfaat.

11) Materialitas (*Materiality*)

Materialitas adalah besar kecilnya atau penghilangan atau penyalahsajian informasi akuntansi yang menjadikan besar kemungkinan bahwa pertimbangan seseorang bijaksana yang mengandalkan diri pada informasi tersebut berubah atau terpengaruh oleh penghilangan/ pengabaian atau penyalahsajian tersebut. Pertimbangan materialitas lebih banyak dihadapi oleh manajemen dan auditor di tataran badan usaha (penyajian statement keuangan) daripada oleh perekayasa atau penyusunan standar.

Menurut PP No.24 Tahun 2005 karakteristik kualitatif informasi didefinisikan sebagai ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Ukuran-ukuran normatif tersebut antara lain: relevan (*Feedback Value, Predictiv Value, Tepat Waktu, lengkap*), andal (*penyajian jujur, dapat diverifikasi, netralitas*), dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

3. Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*). Tim GTZ-USAID/CLEAN Urban, 2001(dalam Indriasari, *et al.*2008), kapasitas sumber daya manusia adalah merupakan kemampuan baik

dalam tingkatan individu, organisasi atau kelembagaan, maupun sistem untuk melaksanakan fungsi- fungsi akuntansi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kemampuan dalam melaksanakan fungsi ini terdiri dari, yaitu:

- a. Bagian keuangan memiliki staf yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup.
- b. Minimal staf subbagian keuangan/akuntansi merupakan lulusan D3 akuntansi atau lebih tinggi.
- c. Memiliki uraian peran dan fungsi yang jelas dalam melaksanakan tugas.
- d. Peran dan tanggung jawab ditetapkan secara jelas dalam peraturan daerah.
- e. Uraian tugas sesuai dengan fungsi akuntansi yang sesungguhnya.
- f. Terdapat pedoman mengenai prosedur dan proses akuntansi.
- g. Telah melaksanakan proses akuntansi.
- h. Memiliki sumber daya pendukung operasional yang cukup.
- i. Dilakukannya pelatihan-pelatihan untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dalam tugas.
- j. Adanya dana yang dianggarkan untuk memperoleh sumber daya, peralatan, pelatihan yang dibutuhkan.

Menurut Warsoko (2007:53) Kemampuan (*ability*) merupakan salah satu unsur penting dalam masalah manajemen dan kepemimpinan, yaitu kekuasaan, kewibawaan, dan kemampuan. Kemampuan berhubungan dengan kecakapan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan, dan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja atau produktivitas

tenaga kerja, dalam artian sejauh mana seseorang dapat mencapai hasil yang memuaskan dalam bekerja tergantung dari kecakapan atau kemampuan yang dimiliki. Sedangkan Nitisemito (1996:40) kemampuan merupakan keterpaduan dari unsur- unsur antara lain: pendidikan, kedisiplinan, bakat, kesehatan dan keselamatan kerja, serta pengalaman kerja. Jadi pengalaman kerja sangat berkaitan dengan kemampuan seseorang, atau pengalaman kerja akan meningkatkan kemampuan yang dimiliki.

Silalahi (1995:55) menyatakan bahwa kemampuan kerja yang diistilahkan dengan kematangan berkarya yang dihubungkannya dengan interaksi manusia dan peralatan, akan selalu berfluktuasi karena meliputi unsur- unsur: tanggung jawab; kemampuan menetapkan sasaran yang tinggi tetapi terjangkau; pengalaman dan pendidikan; kebiasaan hidup; serta pandangan hidup. Sedangkan menurut Bagir (1988) dalam Sosanto (2007:53) produktivitas tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan latihan

Pelatihan sebagai salah satu komponen dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu untuk diberikan kepada tenaga kerja. Pelatihan akan memberikan dasar- dasar kerja secara fundamental/ mendasar dari suatu deskripsi kerja yang dibebankan. Pelatihan semacam ini lebih tepat disebut sebagai pelatihan teknis. Agus dalam Soetanto (2007:53) pelatihan teknis merupakan upaya pembinaan keterampilan dasar yang diperlukan pegawai baru atau lama untuk melaksanakan pekerjaan. Berkaitan dengan pengalaman kerja, kemampuan kerja, dan pelatihan yang dimiliki oleh seorang

tenaga kerja, lama waktu penugasan menentukan tingkat kualitas tenaga kerja itu yang mana ini mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Menurut Widjajanto (2001:20) kualitas karyawan ditentukan oleh tiga aspek, yaitu pendidikan, pengalaman, dan akhlak. Pendidikan yang rendah dapat diisi oleh pengalaman yang panjang. Sebaliknya, pengalaman yang pendek dapat diisi oleh pendidikan yang sesuai dan panjang, meskipun dalam beberapa jenis pekerjaan, pengalaman mutlak diperlukan. Unsur akhlak sangat diperlukan untuk posisi-posisi jabatan yang berkaitan langsung dengan harta perusahaan, dan pucuk pimpinan yang berwenang dalam pengambilan keputusan.

Sedangkan menurut Tjiptoherijanto, 2001 (dalam Indriasari, *et al.* 2008), untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumberdaya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumberdaya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Menurut Havesi, 2005 (dalam Indriasari, *et al.* 2008) Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah

karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga.

Menurut Dunnetts,2004 (dalam Indriasari,*et al.*2008), *skill* adalah kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu rangkaian tugas yang berkembang dari hasil pelatihan dan pengalaman. Sedangkan Menurut Blanchard & Thacker,2004 (dalam Indriasari, *et al.*2008), *skill* seseorang tercermin dari seberapa baik seseorang dalam melaksanakan suatu kegiatan yang spesifik seperti mengoperasikan suatu peralatan, berkomunikasi efektif, atau mengimplementasikan suatu strategi bisnis.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

a. Teknologi Informasi

1) Teknologi

Menurut Jogiyanto (7:1995) Teknologi merupakan alat yang digunakan individu dalam penyelesaian tugas mereka. Dalam konteks sistem informasi, teknologi terkait dengan sistem komputer (perangkat keras, perangkat lunak, data) dan penggunaan jasa pendukung (training, misalnya) yang memberikan panduan penggunaan dalam penyelesaian tugas.

Komputer telah menggantikan teknologi manual dengan melakukan pemrosesan atas data yang jumlahnya sangat besar, ataupun menjalankan pekerjaan yang sangat kompleks. Komputer juga dapat bekerja sangat

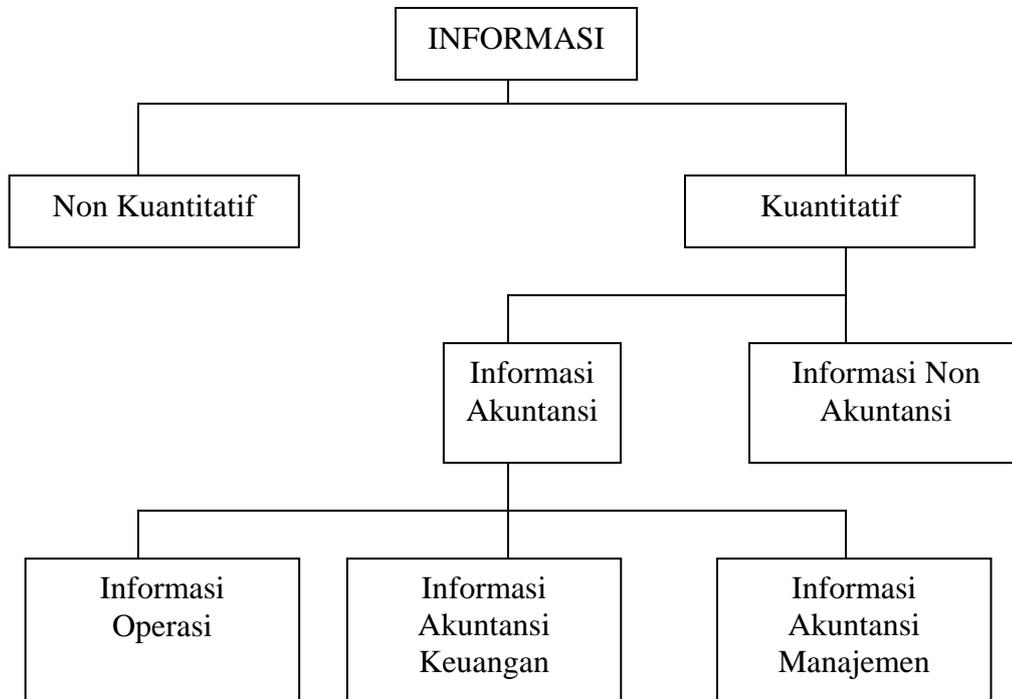
konsisten serta reliabel (dapat dipercaya) dalam waktu yang lebih cepat bila dibanding dengan kemampuan manusia.

2) Informasi

Menurut Jogiyanto (11:1995) Informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Sedangkan menurut menurut Davis,2002 (dalam Sidik. 2008) informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang.

Menurut Mulyadi (11:1997) Informasi merupakan suatu fakta, data, pengamatan, persepsi, atau sesuatu yang lain, yang menambah pengetahuan. Berdasarkan beberapa pendapat diatas disimpulkan bahwa informasi meliputi unsur- unsur data, pengelolaan data menambah pengetahuan dan dasar pembuatan keputusan saat sekarang atau masa yang akan datang. Secara rinci bentuk informasi dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1
Bentuk Informasi



Sumber: *Mulyadi (1997:12)*

3) Teknologi Informasi

Nugroho (14:2001) Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang menitikberatkan penggunaan komputer dan teknologi yang berhubungan dengan pengaturan sumber informasi. Selain itu teknologi informasi didefinisikan sebagai teknologi yang digunakan untuk memperoleh, memanipulasi, mengkomunikasikan, menyajikan, dan memanfaatkan data. Defenisi ini dibatasi pada teknologi informasi yang didukung oleh komputer. Menurut Gazali, 2004 (dalam Sidik, 2008) mengemukakan keunggulan dan kelemahan dari teknologi informasi, sebagai berikut:

(1).Keunggulan Teknologi Informasi

a) Tepat waktu dan akurat

b) Dengan penggunaan sistem informasi berbasis komputer maka hasil outputnya dalam bentuk informasi dapat disajikan tepat waktu dan data yang didapat akurat

c) Untuk pengambilan keputusan

Teknologi informasi memberikan kemudahan bagi manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan karena prosesnya cepat

d) Digunakan untuk berbagai integrasi

Teknologi informasi dapat digunakan untuk integrasi kerja baik itu integrasi vertikal maupun horizontal

e) Memperoleh informasi yang kompetitif

Teknologi informasi dapat membantu perusahaan dalam memperoleh informasi yang kompetitif

f) Informasi yang bermanfaat

Teknologi informasi menyajikan informasi dalam bentuk yang berguna dan dapat digunakan untuk mengirim informasi ke orang lain atau ke lokasi lain.

g) Penyajian data cepat

Teknologi informasi mengintegrasikan data dari berbagai bagian, mengurangi pekerjaan klerikal dan mempercepat penyajian data yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan

(2).Kelemahan Teknologi Informasi

Kelemahan dari teknologi informasi adalah apabila terjadi suatu kesalahan dalam pengelolaan data akan berakibat fatal bagi informasi yang disajikan.

Oleh karena itu harus ada sistem *protection* yang kuat untuk melindungi dokumen- dokumen penting dan adanya pembatasan akses terhadap suatu jaringan. Maka diperlukan orang tertentu yang bisa dipercaya untuk menjaga kerahasiaan perusahaan dan dibutuhkan biaya yang besar untuk penerapan sistem perlindungan tersebut.

Peran teknologi informasi semakin penting dikarenakan kita sudah memasuki era informasi (*Information Age*). Era informasi, komputer digital dan jaringan (*Network*) mengubah konsep ekonomi yang tidak mengenal ruang dan waktu sehingga timbul istilah *Digital Network, Economy Network*. Kesuksesan penggunaan teknologi informasi sangat tergantung pada teknologi itu sendiri dan tingkat keahlian individu yang mengoperasikannya. Adanya keahlian yang memadai dari personil EUC (*End- User Computing*) menyebabkan aktivitas EUC yang antara lain berupa pengelolan data (*Word Processing*), komunikasi elektronik (*Elektronik Communication*), dan aktivitas otomatisasi lainnya yang dapat berjalan dengan baik sehingga aplikasi teknologi yang berbasis komputer dapat memberikan manfaat.

Jogiyanto (91:1995) Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware dan software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan

alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya

Penerapan sistem informasi seringkali harus menggunakan komputer, begitu pula sistem informasi akuntansi juga memberikan peranan pada komputer sebagai media untuk meningkatkan nilai informasi akuntansi. Penggunaan komputer mengidentifikasi perlunya penerapan teknologi informasi yang lebih luas. Teknologi informasi mencakup penggunaan *software* dan *hardware* dengan tetap berpegang pada kompleksitas dan kebutuhan sistem

Warsoko (2007:51) menyatakan bahwa terdapat dua alasan utama mengapa pengguna komputer sangat penting karena alasan *pertama*, tentang kemampuan komputer untuk mengolah data. Ciri- ciri kemampuan komputer dapat diuraikan sebagai berikut: pengolahan yang tepat, akurasi yang tinggi, kapasitas penyimpanan yang besar, efektif untuk tugas berulang, dapat berfungsi hampir secara terus menerus, teliti dalam mendeteksi situasi yang menyimpang, dapat diperbaiki dan ditingkatkan. Alasan *kedua*, komputerisasi sudah tersedia dimana saja dan dapat diperoleh dengan mudah dengan biaya relatif murah. Namun apabila kemampuan keuangan suatu organisasi telah memungkinkan untuk menyelenggarakan sistem informasi berbasis komputer organisasi tersebut tidak menyesuaikan diri dengan tuntutan kebutuhan yang mengharuskan pengelolaan data yang cepat, efektif, dan efisien.

b. Pemanfaatan teknologi informasi

Menurut Jogiyanto (12:1995) Pemanfaatan adalah perilaku karyawan teknologi dalam tugasnya, pengukurannya berdasarkan frekuensi penggunaan dan diversitas aplikasi yang dijalankan. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna teknologi informasi dalam melaksanakan tugasnya, pengukurannya berdasar frekuensi penggunaan dan diversitas aplikasi yang dijalankan. Menurut Jogiyanto (1995:7) bahwa aplikasi teknologi sangat berperan dalam pengelolaan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan manajemen.

Menurut Jurnal dan Supomo (2002:214) pemanfaatan teknologi adalah tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas- tugas akuntansi. Pemanfaatan tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas- tugas akuntansi terdiri dari, yaitu:

- 1) Bagian akuntansi/keuangan memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas.
- 2) Jaringan internet telah terpasang di unit kerja.
- 3) Jaringan komputer telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan.
- 4) Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi.
- 5) Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan *software* yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 6) Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi.
- 7) Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur.
- 8) Peralatan yang usang/rusak didata dan diperbaiki tepat pada waktunya.

Menyangkut pemanfaatan teknologi dalam menghasilkan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah, hal ini didasarkan kepada semakin meningkatnya total volume APBN/ D dari tahun ketahun. Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kauntitas yang semakin besar dan kaulitas yang semakin kompleks dan rumit. Menurut Sugijanto (56:2002), peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks tentu harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah. Untuk itu Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, termasuk hal pembuatan pelaporan keuangan dalam rangka menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, Sistem akuntansi keuangan daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah. Sedangkan menurut Widjajanto (2001:89) secara umum manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan membantu dalam penyiapan laporan.

5. Peningkatan Nilai Informasi

Wahana komputer, 2003 (dalam Indriasari, *et al.* 2008), pengolahan data menjadi suatu informasi dengan bantuan komputer jelas akan lebih meningkatkan nilai dari informasi yang dihasilkan. Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, komputer akan meningkatkan kapabilitas sistem. Ketika komputer dan komponen-komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam suatu sistem informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau dikurangi. Sistem informasi akuntansi masih mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Sistem masih memasukkan pengendalian-pengendalian atas keakurasian data. Sistem juga menghasilkan laporan-laporan dan informasi lainnya. Hanya saja pengkomputerisasian sistem informasi akuntansi seringkali mengubah karakter aktivitas. Data mungkin dikumpulkan dengan peralatan khusus. Catatan akuntansi menggunakan lebih sedikit kertas. Kebanyakan, jika tidak semuanya, tahapan-tahapan pemrosesan dilakukan secara otomatis. Output

lebih rapi, dalam bentuk yang lebih bervariasi, dan lebih banyak. Terlebih lagi, output dapat didistribusikan kepada orang lain yang terhubung lewat LAN.

Menurut Wilkinson,2000 (dalam Indriasari,et al.2008)

”...yang lebih penting dari semua perubahan ini adalah peningkatan dalam hal (a) pemrosesan transaksi dan data lainnya lebih cepat, (2) keakurasian dalam perhitungan dan perbandingan lebih besar, (3)kos pemrosesan masing- masing transaksi lebih rendah, (4)penyiapan laporan dan output lainnya lebih tepat waktu, (5)tempat penyimpanan data lebih ringkas dengan aksesibilitas lebih tinggi ketika dibutuhkan, (6)pilihan pemasukan data dan penyediaan output lebih luas/ banyak, dan (7)produktivitas lebih tinggi bagi karyawan dan manager yang belajar untuk menggunakan komputer secara efektif dalam tanggung jawab rutin dan pembuatan keputusan”

Sedangkan kelemahannya, sistem komputer cenderung kurang fleksibel dan tidak dapat cepat beradaptasi jika ada perubahan sistem, perencanaan dan pembuatan sistem terkomputerisasi memakan waktu lebih lama, biaya pemasangan instalasi tinggi, butuh kontrol yang lebih baik, jika ada bagian *hardware* yang tidak bekerja dapat melumpuhkan sistem, komputer tidak dapat mendeteksi penyebab kesalahan, hilangnya jejak audit, komputer peka terhadap pengaruh lingkungan, data yang disimpan mudah rusak (Pujonggo, 2004).

Warsoko (2007:50) menyatakan bahwa informasi yaitu data yang berguna yang diolah sehingga dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat. Sedangkan Cushing (1988) dalam Warsoko (2007) menyatakan informasi yaitu hasil dari pengelolaan data yang diorganisasi dan berguna bagi penerimanya. Jadi hubungan informasi tersebut menitikberatkan pada kegunaan data pada nilai guna yang dihasilkan oleh data itu.

6. Pengendalian Intern Akuntansi

a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Mulyadi (1993:165) mendefenisikan pengendalian intern itu sendiri meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran- ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Defenisi sistem pengendalian intern ini menekankan pada tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur- unsur yang membentuk sistem tersebut. Menurut tujuannya, pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua yaitu pengendalian intern akuntansi (*internal accounting control*) dan pengendalian intern administratif (*internal administrativ control*). Pengendalian intern akuntansi merupakan bagian dari sistem pengendalian intern.

Pengendalian intern adalah suatu sistem pengendalian yang meliputi struktur organisasi beserta semua metode dan ukuran yang diterapkan dalam perusahaan. Pengendalian intern menurut Widjajanto (2001:18) adalah sebagai berikut:

“Pengendalian yang diterapkan dalam perusahaan atau organisasi bertujuan untuk:1)mengamankan aktiva perusahaan, 2)mengecek kecermatan dan ketelitian data akuntansi, 3)meningkatkan efisiensi, dan 4)mendorong agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh segenap jajaran organisasi”.

Sedangkan menurut Arens dalam Amir (1996: 258), sistem pengendalian intern terdiri dari kebijakan- kebijakan dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen keyakinan yang memadai

bahwa tujuan dan sasaran yang penting bagi satuan usaha dapat dicapai. Salah satu tujuan dan sasaran manajemen yaitu menghasilkan laporan keuangan yang andal. Manajemen bertanggung jawab dalam menyiapkan laporan keuangan bagi investor, kreditor, dan pengguna lainnya. Manajemen mempunyai kewajiban hukum dan profesional untuk menjamin bahwa informasi telah disiapkan sesuai dengan standar pelaporan, misalnya prinsip akuntansi yang berlaku umum.

b. Unsur Pengendalian Intern

Menurut Arens dalam Amir (1996: 258), unsur atau elemen pengendalian intern terdiri dari, yaitu:

- 1).Lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan, kebijakan dan prosedur yang mencerminkan sikap menyeluruh manajemen puncak, direktur, komisaris, dan pemilik satuan usaha terhadap pengendalian dan pentingnya terhadap satuan usaha tersebut.
- 2).Penetapan resiko untuk pelaporan keuangan adalah identifikasi dan analisis oleh manajemen atas resiko- resiko yang relevan terhadap penyiapan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Manajemen menetapkan resiko sebagai bagian dari perancangan dan pengoperasian struktur pengendalian intern untuk meminimalkan salah saji atau ketidakberesan dalam laporan keuangan.

- 3).Sistem akuntansi digunakan untuk mengidentifikasi, menggabungkan, mengklasifikasikan, menganalisa, mencatat dan melaporkan transaksi satu satuan usaha, dan untuk mengelola akuntabilitas atas aktiva terkait
- 4).Prosedur pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan manajemen untuk memenuhi tujuannya untuk pelaporan keuangan. Prosedur pengendalian terdiri atas: pemisahan tugas yang memadai, otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas, dokumen dan catatan yang memadai, pengendalian fisik atas aktiva dan catatan, pengecekan independen atas pelaksanaan.
- 5).Pemantauan adalah penilaian efektivitas rancangan operasi struktur pengendalian intern secara periodik dan terus menerus oleh manajemen untuk melihat apakah manajemen telah dilaksanakan dengan semestinya dan telah diperbaiki sesuai dengan keadaan.

Sedangkan Mahmudi (2007) dalam Indriasari (2008) menyebutkan komponen penting yang terkait dengan pengendalian intern akuntansi antara lain sebagai berikut :

1) Sistem dan prosedur akuntansi

Sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah merupakan serangkain tahap dan langkah yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi tertentu. Sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah paling sedikit meliputi (pasal Nomor 58 Tahun 2005): (1) sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas, (2) sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas, (3) sistem dan prosedur akuntansi aset; dan (4) sistem dan prosedur akuntansi selain kas.

2) Otorisasi

Otorisasi dalam sistem akuntansi pemerintah daerah sangat penting karena tanpa sistem otorisasi yang baik, maka keuangan daerah sangat beresiko untuk terjadi kebocoran. Sistem otorisasi menunjukkan ketentuan tentang orang atau pejabat yang bertanggung jawab mengotorisasi suatu transaksi yang terjadi di pemerintah daerah. Otorisasi tersebut bisa berbentuk kewenangan dalam memberikan tanda tangan pada formulir dan dokumen tertentu. Tanpa otorisasi dari pihak yang berwenang maka transaksi tidak dapat dilakukan, atau walaupun ada transaksi tanpa otorisasi maka transaksi tersebut dikategorikan tidak sah atau ilegal.

3) Formulir, dokumen, dan catatan

Setiap transaksi yang terjadi di pemerintah daerah harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah. Selain terdapat bukti yang valid dan sah, transaksi tersebut harus dicatat dalam buku catatan akuntansi. Kelengkapan formulir dan dokumen transaksi serta catatan akuntansi sangat penting dalam proses audit keuangan.

4) Pemisahan tugas

Fungsi-fungsi atau pihak yang terkait dalam suatu transaksi harus dipisahkan. Suatu transaksi dari awal hingga akhir tidak boleh ditangani oleh suatu fungsi atau satu orang saja. Harus dipisahkan antara fungsi pencatat uang serta pengotorisasi. Harus dilakukan pemisahan tugas secara tegas dengan deskripsi tugas pokok dan fungsi yang jelas dalam rangka menghindari terjadinya kolusi, kecurangan, dan korupsi.

Sedangkan Amir (1996) dalam Devfi (2008). Komponen dari sistem pengendalian intern terdiri dari:

1) Lingkungan Pengendalian

- a. Integritas dan nilai- nilai etika
- b. Komitment terhadap kompetensi
- c. Falsafah manajemen dan gaya operasi
- d. Struktur organsasi
- e. Dewan komisaris dan komite audit
- f. Pelimpahan wewenang dan tanggungjawab
- g. Kebijakan dan prosedur kepegawain

2) Penilain Resiko

- a. Menetapkan resiko sebagai bagian dari perancangan dan pengoperasian struktur penegndalian intern untuk meminimalkan salah saji dan ketidakberesan
- b. Menilai dan bereaksi secara efektif terhadap resiko

3) Aktivitas Pengendalian

- a. Pemisahan kewajiban yang memadai
- b. Otoritas yang pantas atas transaksi dan aktivitas
- c. Dokumen dan catatan yang memadai
- d. Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan
- e. Pemeriksaan independent atas pelaksanaan

4) Informasi dan Komunikasi

Tujuan informasi dan komunikasi akuntansi adalah untuk memulai, mencatat, memproses dan melaporkan transaksi dan untuk memelihara akuntabilitas aktiva yang terkait.

5) Pemantauan.

a. Pemantauan dilaksanakan secara periodik

b. Menilai kualitas intern

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independent atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan, dan telaah sejawat. Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, dan pembimbingan dan konsultasi SPIP, serta peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, unsur atau elemen pengendalian intern terdiri dari, yaitu:

1) Pasal 232 ayat 1 Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan.

- 2) Sistem akuntansi keuangan daerah sebagaimana pada ayat 1 meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
- 3) Proses akuntansi didokumentasikan dalam bentuk buku jurnal dan buku dan buku besar, dan apabila diperlukan ditambahkan dengan buku besar pembantu.
- 4) Sistem akuntansi pemerintah daerah disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengendalian internal dan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan.
- 5) Kode rekening untuk menyusun neraca, laporan realisasi anggaran digunakan dan disusun dengan memperhatikan kepentingan penyusunan laporan statistik keuangan daerah/ negara
- 6) Semua transaksi dan/ atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah dicatat pada buku jurnal berdasarkan bukti transaksi yang sah
- 7) Pencatatan dilakukan secara kronologis sesuai dengan terjadinya transaksi dan/ atau kejadian keuangan
- 8) Transaksi atau kejadian keuangan yang telah dicatat dalam buku jurnal selanjutnya secara periodik diposting ke buku besar sesuai dengan rekening berkenaan. Buku besar ditutup dan diringkas pada akhir setiap periode

sesuai dengan kebutuhan. Dan saldo setiap akhir periode dipindahkan menjadi saldo awal periode berikutnya.

- 9) Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan yang disampaikan kepada kepala daerah dan diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 10) Adanya pemisahan tugas dalam rangka pelaksanaan APBD antara pejabat penatausahaan keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD, pejabat pelaksana teknis kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK, dan bendahara pengeluaran.
- 11) Pelimpahan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

c. Isu Tentang Sistem Pengendalian Intern

Isu tentang sistem pengendalian intern pemerintahan (SPIP) mendapat perhatian cukup besar belakangan ini. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal senantiasa menguji “kekuatan” SPI ini di setiap pemeriksaan yang dilakukannya untuk menentukan luas lingkup (*scope*) pengujian yang akan dilaksanakannya. Beberapa lembaga pemantau (*watch*) juga mengkritisi lemahnya SPI yang diterapkan di pemerintah, sehingga membuka peluang yang sangat besar bagi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran (APBN/ APBD). Pemerintah sendiri kemudian

menerbitkan PP No.60/2008 tentang standar pengendalian internal pemerintah. PP No 60/2008 ini terdiri dari empat bab dan 61 pasal. Empat bab tersebut adalah Bab I: Ketentuan umum; Bab 2: Unsur sistem pengendalian intern pemerintah ; Bab 3 : Penguatan efektivitas penyelenggaraan SPIP; dan Bab 4: Ketentuan penutup serta dilengkapi dengan penjelasan dan lampiran berupa daftar uji pengendalian intern pemerintah. Pasal 60 dan 61 berbunyi : Ketentuan mengenai SPIP di lingkungan pemerintah daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur atau peraturan Bupati/ Walikota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah ini.

Dalam penjelasan PP No.60/2008 dijabarkan latar belakang dan arti penting penerbitan peraturan yang mengatur “urusan internal” pemerintah dan Pemda ini. Terkait dengan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, yang diatur dalam UU No. 15/ 2004 disebutkan bahwa *Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/ kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.* (Pasal 11 UU No.15/2004). Pada bagian lain UU tersebut dinyatakan bahwa BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah. Dalam hal ini, laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK (Pasal 9 UU No. 15/2004)

Undang- undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di

instansi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban melalui pelaporan, harus secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberikan keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal dan dapat dipahami, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai sistem pengendalian intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah tersebut

Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara memerintahkan pengaturan lebih lanjut ketentuan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah secara menyeluruh dengan peraturan pemerintrah. Sistem pengendalian intern dalam peraturan pemerintah ini dilandasi pada pemikiran bahwa sistem pengendalian intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia serta hanya memberikan keyakinan yang memadai bukan keyakinan mutlak.

Berdasarkan pemikiran tersebut, dikembangkan unsur sistem pengendalian intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern. Pengembangan unsur sistem pengendalian intern perlu mempertimbangkan

aspek biaya-manfaat (*cost-benefit*), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komperhensif.

B. Kajian Riset

Penelitian mengenai sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintah pernah dilakukan. Penelitian Dinata (2004) menemukan bukti empiris bahwa secara garis besar sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintahan Kota Palembang belum sepenuhnya dinyatakan siap atas berlakunya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintahan masih belum memadai. Kapasitas sumber daya manusia yang masih minim ini memiliki pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah.

Dari penelitian Taufik (2008) yang meneliti mengenai kesiapan pemerintah Kota Padang dalam penerapan akuntansi keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan masih belum meratanya kesiapan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) yang ada di lingkungan pemerintahan kota Padang dalam melaksanakan sistem akuntansi keuangan daerah baik itu dari segi *users*, karyawan (sumber daya manusia), motivasi dari pimpinan, manajemen data yang baik, teknologi informasi yang memadai, dan pendistribusian data kepada *users* secara efektif.

Dari penelitian yang dilakukan Taufik (2008) menghasilkan kesimpulan bahwa masih kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan akuntansi keuangan daerah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan bagian keuangan pada pemerintah Kota Jambi.

Penelitian yang dilakukan oleh Indriasari, *et al.* (2008) pada Kota Palembang dan Ogan Hilir yang meneliti pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi (yaitu keterandalan dan ketepatanwaktuan) pelaporan keuangan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi. Sedangkan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi

Kegiatan lokakarya eksplorasi pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara pada tahun 2003 (dalam Indriasari, *et al.*2008) berhasil mengidentifikasi permasalahan sumber daya manusia dalam tiga tingkatan yaitu tingkat sistem, lembaga, dan individu. Hasil perangkaian dari permasalahan tersebut menetapkan urutan prioritas penanganan yang pertama adalah penempatan pegawai kurang sesuai dengan bidang ilmu yang berdampak pada rendahnya pemahaman aparatur terhadap tugas dan fungsinya. Selain itu terkait dengan sumber daya manusia di satuan kerja di Indonesia. Sebuah tulisan di Media Indonesia. (1:2006) menyebutkan bahwa dari 19.670 satuan kerja, hanya empat orang akuntannya.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintahan masih belum memadai. Kapasitas sumber daya manusia yang masih minim ini mungkin memiliki pengaruh terhadap dapat dipahaminya pelaporan keuangan pemerintah.

Kebutuhan dukungan teknologi dan sumber daya manusia harus sesuai dengan latar belakang pendidikan serta pelatihan akuntansi yang memadai. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi. Pada Penelitian yang dilakukan oleh Donnelly (1994) dalam Indriasari (2008) menemukan bahwa sistem/teknologi informasi yang dimiliki pemerintah daerah di Skotlandia belum begitu baik.

Dari penelitian Muliani (2000) menghasilkan kesimpulan bahwa perkembangan teknologi informasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap bidang akuntansi manajemen. Kehadiran teknologi informasi memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, seperti mampu meringankan aktivitas bisnis yang kompleks serta menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, relevan, tepat waktu, lengkap, dapat dipahami, dan teruji dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan manajemen. Oleh sebab itu peneliti juga menguji apakah penerapan teknologi informasi juga mempunyai dampak positif terhadap penciptaan nilai informasi pada manajemen pemerintahan, terutama dalam hal pelaporan keuangan pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Soetanto (2007) membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi akuntansi pada implementasi basis data program *Financial Accounting And Monitoring System* (PFAMS).

Penelitian ini dilakukan pada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek pembangunan prasarana.kota terpadu, yaitu pemerintah, konsultan, dan auditor di Jawa Timur. Hasil penelitian Soesanto menunjukkan bahwa kualitas nilai informasi akuntansi sistem yang berbasis data PFMAS pada proyek terpadu di Jawa Timur secara signifikan dipengaruhi oleh kualitas sumberdaya manusia, kualitas lembaga pengelola, kualitas sarana dan prasarana, dan kemudahan data. Kualitas sumber daya manusia ditunjukkan oleh kualitas operator PFMS. Hasil regresi menyatakan bahwa kualitas operator yang didefinisikan oleh pengalaman dan kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan khususnya sistem informasi akuntansi berbasis data PFAMS memberikan pengaruh yang signifikan pada peningkatan kualitas informasi. Penelitian yang berhubungan dengan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi belum pernah dilakukan untuk menguji pengaruhnya terhadap nilai informasi (dapat dipahami) pelaporan keuangan pemerintah

C.Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah

Berdasarkan Paket UU dibidang Keuangan Negara Tahun 2003-2004 yang dikeluarkan oleh pemerintah diantaranya adalah PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mulailah disusun pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

(LKKP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Format laporan keuangan pemerintah tersebut telah disusun lebih rinci dan sistematis sehingga informasi yang dihasilkan lebih dipahami dan dicerna sebagai nilai informasi oleh masyarakat luas. Perubahan pada laporan keuangan pemerintah tersebut juga meliputi sistem pembukuannya, yaitu dirubah dari sistem satu sisi (*single entry*) menjadi sistem pembukuan yang menggunakan dua sisi berpasangan (*double entry*).

Perubahan pada format LKKP/ LKKPD tersebut dalam pelaksanaannya membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang memadai serta dukungan teknologi informasi. Hal ini sesuai dengan elemen perbaikan sitem fiskal dalam sistem keuangan negara yang disampaikan BPK bahwa untuk menjaga kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diperlukan sistem akuntansi yang terpadu dan terkomputerisasi serta pengawasan oleh aparat internal sehingga masalah ataupun kelemahan dalam LKP dapat diantisipasi .

Berdasarkan temuan dan opini pemeriksaan BPK atas LKKP dan LKPD tahun 2004, 2005,2006,2007, juga mengemukakan bahwa kelemahan pada laporan keuangan instansi pemerintah disebabkan oleh tidak sinkronnya sistem komputer instansi pemerintah, serta lemahnya pengawasan internal pemerintah yang bisa diakibatkan dari praktek otoriter selama order baru dan juga didukung dengan penelitian yang dilakukan Indriasari yang mana nilai informasi yang dihasilkan dari pelaporan keuangan tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia yang ada serta dukungan teknologi yang

memadai dan pengendalian intern yang baik pada masing- masing instansi pemerintah pada daerah Kota Palembang. Berdasarkan urain diatas maka dapat diajukan hipotesis: kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi secara bersama- sama berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah, sesuai dengan yang akan diuji pada hipotesis 1.

2. Hubungan Kapasitas Sumber Daya Manusia dengan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah

PP Nomor 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 serta Kepmendagri Nomor 13 Tahun 2006 telah membawa perubahan besar dan memberikan pendekatan baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Perubahan yang mendasar dalam PP Nomor 105 Tahun 2000 adalah terkait dengan perubahan dalam sistem penganggaran, baik proses penganggarannya maupun bentuk dan struktur APBD. Perubahan tersebut merupakan suatu perubahan yang bersifat paradigmatik, sementara perubahan yang lebih bersifat pragmatik dan teknis operasional diatur dalam Kepmendagri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu terkait dengan penatausahaan keuangan daerah. Perubahan itu sudah sampai pada teknik akuntansinya yang meliputi perubahan dalam pendekatan sistem akuntansi dan prosedur pencatatan, dokumen dan formulir yang digunakan, fungsi-fungsi otorisasi untuk tujuan sistem pengendalian intern, laporan, serta pengawasan (Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006).

Perubahan tersebut membutuhkan dukungan teknologi dan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang memadai. Selain itu, rendahnya pemahaman pegawai terhadap tugas dan fungsinya serta hambatan di dalam pengolahan data juga dapat berdampak pada keterlambatan penyelesaian tugas yang harus diselesaikan, salah satunya adalah penyajian laporan keuangan. Keterlambatan penyajian laporan keuangan berarti bahwa laporan keuangan belum/tidak memenuhi nilai informasi yang disyaratkan, yaitu ketepatanwaktuan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diajukan hipotesis: kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah, sesuai dengan yang akan diuji pada hipotesis 2.

3. Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk

membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Penelitian yang berhubungan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi pada organisasi sektor publik sudah banyak dilakukan. Uraian dan temuan empiris yang dilakukan Sidik (2008) mengenai teknologi informasi menunjukkan bahwa pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan/ketepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna, *multiprocessing*. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi. Penelitian Donnelly *et al.*, (1994) menemukan bahwa sistem/teknologi informasi yang dimiliki pemerintah daerah di Skotlandia belum begitu baik. Hal ini boleh jadi dialami juga oleh pemerintah daerah di Indonesia sebagaimana dikatakan oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, dalam gala *dinner* bersama Guru Besar Pemasaran, Philip Kotler di Jakarta, Beliau mengakui bahwa bangsa Indonesia masih belum mampu menggunakan secara maksimal Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), walaupun teknologi tersebut telah tersedia (ANTARA News, 2007).

Selain keterandalan hasil operasi dan kemampuan untuk mengurangi *human error*, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengolahan data diketahui memiliki keunggulan dari sisi kecepatan. Suatu entitas akuntansi yang bernama “pemerintah daerah”, sudah pasti akan memiliki transaksi yang

kompleks dan besar volumenya. Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu keterpahaman. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diajukan hipotesis: pemanfaatan teknologi informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah, sesuai dengan yang akan diuji pada hipotesis3

4. Hubungan Pengendalian Intern Akuntansi dengan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah

Penyimpangan dan kebocoran yang masih ditemukan di dalam laporan keuangan pemerintah menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut belum memenuhi karakteristik/nilai informasi. Menurut Wahyono (2004:5), dari sistem informasi yang ada diharapkan mampu memproses serta menghasilkan data keuangan dan non keuangan menjadi suatu informasi yang dapat digunakan (bernilai) untuk pengambilan keputusan yang mana sistem akuntansi sudah menjadi satu kesatuan dari proses akuntansi, mulai dari akuntansi keuangan, audit dan saat ini sampai pada sistem pengendalian. Oleh karena sistem akuntansi memerlukan pengendalian intern atau dengan kata lain nilai informasi akuntansi berkaitan erat dengan pengendalian intern organisasi. Menurut Mahmudi (2007) dalam (Indriasari, *et al.*2008) Bila dikaitkan dengan penjelasan mengenai pengendalian intern akuntansi, maka penyebab ketidakpahaman laporan keuangan tersebut merupakan masalah yang berhubungan dengan pengendalian intern akuntansi. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diajukan hipotesis: pengendalian intern akuntansi

berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah, sesuai dengan yang akan diuji pada hipotesis 4.

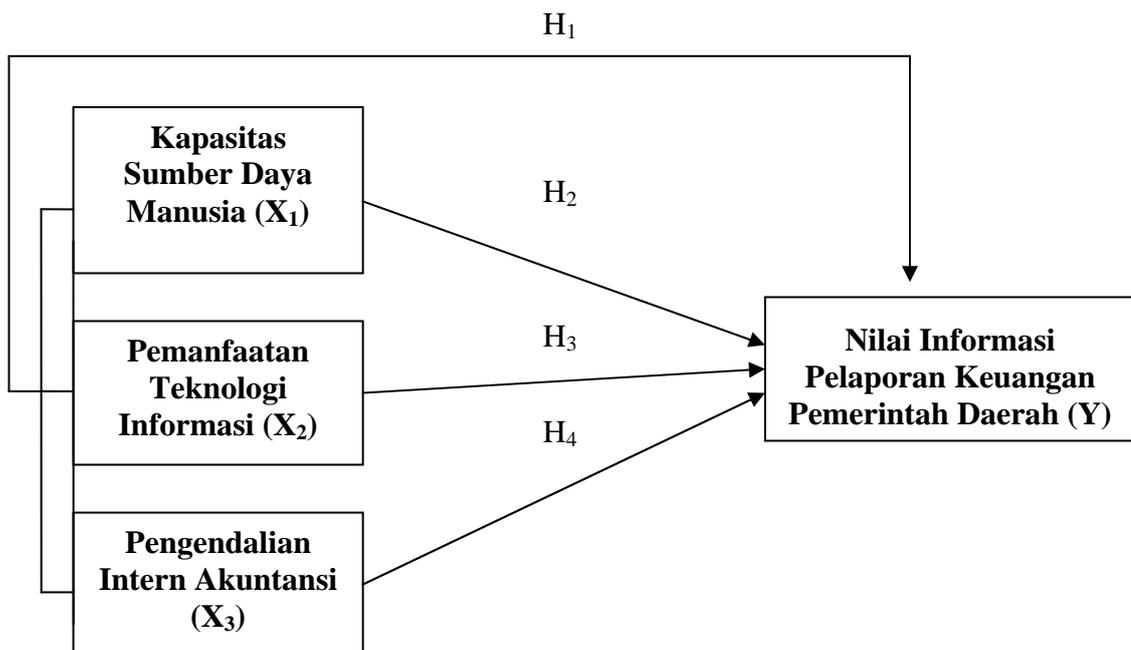
D.Kerangka Konseptual

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan, salah satunya adalah sistem akuntansi yang terdiri dari metoda dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, mengikhtisarkan, dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang, dan ekuitas yang bersangkutan. Sistem akuntansi sebagai suatu sistem informasi membutuhkan manusia untuk menjalankan sistem yang ada. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting.

Peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks tentu harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah (Sugijanto, 2002). Untuk itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Pengendalian intern menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan

Penelitian ini menguji pengaruh kapasitas sumber daya manusia sebagai variabel independent (X_1) mempunyai pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel independent (X_2) mempunyai pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah. Pengendalian intern akuntansi sebagai variabel independent (X_3) mempunyai pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah. Penelitian ini juga menguji pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi secara bersama-sama terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah. Hubungan antara kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2
Kerangka Konseptual Penelitian



E. Hipotesis

Berdasarkan teori dan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat dibuat beberapa hipotesis terhadap permasalahan sebagai berikut :

- H₁ : Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi secara bersama- sama berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah.
- H₂ : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah
- H₃ : Pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah
- H₄ : Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi serta pengaruhnya terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada instansi pemerintah Kota Padang adalah sebagai berikut:

1. Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi , dan pengendalian intern akuntansi secara bersama-sama berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah. Ini berarti bahwa hipotesis keempat diterima.
2. Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada instansi pemerintah daerah Kota Padang. Ini berarti bahwa hipotesis pertama diterima.
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada instansi pemerintah daerah Kota Padang. Ini berarti bahwa hipotesis kedua diterima.
4. Pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Padang. Ini berarti bahwa hipotesis ketiga diterima.

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukannya hanya di satu wilayah di Sumatera Barat, yaitu SKPD yang ada di Kota Padang sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisir ke semua objek secara keseluruhan.
2. Kurangnya pemahaman dari responden terhadap pertanyaan/ pernyataan-pernyataan dalam kuisisioner serta sikap kepedulian dan keseriusan dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. Masalah subjektivitas dari responden dapat mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap biasanya jawaban responden

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh berbagai pihak:

1. Bagi instansi pemerintah diharapkan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam hal pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki baik pada tingkatan sistem, kelembagaan, maupun individu, didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin, dan adanya rancangan pengendalian intern akuntansi yang memadai diharapkan pihak pengelola keuangan daerah khususnya bagian akuntansi mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya bermuara pada

dihasilkannya laporan keuangan pemerintah daerah yang bernilai informasi dan bermanfaat sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan..

2. Pada peneliti berikutnya supaya dapat melengkapi metode survei penelitian ini dengan wawancara karena saat melakukan penelitian ini peneliti sempat mewawancarai beberapa responden dan menemukan adanya perbedaan antara jawaban di kusioner dan jawaban secara lisan untuk pertanyaan/ pernyataan yang sama, dan peneliti berikutnya juga dapat mempertimbangkan untuk menambahkan variabel-variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah, misalnya seperti: wilayah/ lokasi pemerintahan yang terpadu dan kejelasan sistem/ desain perundang- undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- ANTARA News. 2007. Wapres Akui Pemanfaatan TIK Belum Maksimal. www.ANTARA.go.id diakses tanggal 18 Juli 2008.
- Anggraini, Devi. 2002. Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah. Padang: *Skripsi* Program S-1, Universitas Negeri Padang (Tidak Dipublikasikan)
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2006. *Konsep Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. www.google.co.id diakses tanggal 18 Juli 2008.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hidayat, Taufik. 2008. Analisa Kesiapan Pemerintah Kota Padang Dalam Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah. Padang: *Skripsi* Program S-1, Universitas Bung Hatta (Tidak Dipublikasikan)
- Indriasari, Desi. 2008. “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah”. Pontianak: *Jurnal SNA*.
- Indrianto, Nur dan Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Jogiyanto, HM. 1995. *Analisa dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Jurnali, Teddy & Bambang Supomo. 2002. “Pengaruh Faktor Kesesuaian Tugas-Teknologi dan Pemanfaatan TI terhadap Kinerja Akuntan Publik”. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol. 5 No. 2 Hal. 214
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mulyadi. 1997. *Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat, dan Terakayasa*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Muliani. 2000. Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keputusan Manajemen. Padang: *Skripsi* Program S-1, Universitas Bung Hata (Tidak Dipublikasikan)
- Media Indonesia. 9 Desember 2006. Sistem Akuntansi Pemerintah Lemah